

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

A. Prioritas Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009 secara umum diarahkan kepada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban kota sebagai kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka disusunlah Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Prioritas pembangunan tahun 2009 ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis dan ditindaklanjuti oleh program-program yang bertujuan untuk mewujudkan amanat Visi-Misi sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2007-2012

Prioritas pembangunan tahun 2009 diarahkan untuk menghasilkan kinerja sebagai berikut:

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Diprioritaskan untuk menghasilkan kinerja antara lain:

- a. Pengendalian banjir, antara lain : terselesaikannya tahapan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir untuk mengurangi banjir dan genangan di 26 kawasan rawan banjir, antara lain : Banjir Kanal Timur; Kali Ciliwung; Kali Krukut.
- b. Pengelolaan Jaringan Jalan, antara lain : optimallisasi, perluasan dan penambahan jaringan jalan (termasuk jalan layang) di Jakarta, terutama dalam rangka pengembangan wilayah Barat-Timur.
- c. Penyediaan sumber Air Bersih, antara lain Beroperasinya sarana prasarana penyediaan air bersih bagi masyarakat yang belum terjangkau pelayanan air bersih perpipaan.

d. Pengelolaan Fasilitas Pejalan Kaki dengan Jalur Khusus bagi Disabled Person dan Fasilitas Kendaraan Roda Dua.

2. Pembangunan Perhubungan dan Transportasi

Diprioritaskan untuk menghasilkan kinerja antara lain Meningkatnya kapasitas pelayanan angkutan umum, antara lain: berfungsinya kelembagaan Mass Rapid Transit (MRT); Beroperasinya Busway koridor 11 dan 12, meningkatnya kualitas pelayanan Busway koridor 1 sampai 10, restrukturisasi trayek angkutan umum dan pengembangan sistem feeder, serta peningkatan kapasitas ruas jalan dan persimpangan.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Miskin

Diprioritaskan untuk menghasilkan kinerja antara lain Meningkatnya kualitas layanan bagi penduduk miskin, antara lain: meningkatnya akses Gakin terhadap layanan pendidikan, layanan kesehatan, beras murah, permodalan usaha (PPMK), layanan rumah susun sewa serta tertatanya lingkungan permukiman kumuh.

4. Penanggulangan Polusi

Diprioritaskan untuk menghasilkan kinerja antara lain:

a. Berkurangnya polusi udara antara lain : menurunnya tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi dari sumber bergerak (transportasi) dan sumber tidak bergerak (industri) yang melebihi baku mutu udara ambien dan baku tingkat kebisingan; Menurunnya tingkat pencemaran udara dalam ruangan; dan Menurunnya jumlah pelanggaran pada kawasan Dilarang Merokok.

b. Berkurangnya pencemaran air, antara lain : meningkatnya status mutu air (sungai, waduk/situ, air tanah, muara, perairan Teluk Jakarta) yang memenuhi baku mutu; Berkurangnya rumah tangga dan non rumah tangga yang membuang limbah domestiknya melebihi baku mutu serta industri yang membuang limbah cairnya melebihi baku mutu.

c. Meningkatnya kapasitas penanggulangan sampah, antara lain: meningkatnya kemandirian pengelolaan sampah di sumber, meningkatnya layanan TPS/LPS dan terlaksananya tahapan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF), diterapkannya sistem 3 R (Reuse, Reduce and Recycle).

5. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain antara lain: Tidak terjadinya putus sekolah bagi siswa SD, SMP, SMA, SMK; berkurangnya anak usia sekolah yang tidak bersekolah; meningkatnya mutu lulusan sekolah, meningkatnya kompetensi guru dan kapasitas manajemen sekolah.

6. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain meningkatnya mutu layanan Puskesmas Kelurahan pada Kelurahan padat penduduk, Pengembangan Puskesmas Kecamatan dengan fasilitas tempat tidur rawat inap, Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat dengan menempatkan tenaga kesehatan masyarakat di Kelurahan; penyediaan dana untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, tidak mampu, korban wabah dan korban bencana; serta peningkatan aparat kesehatan dan peran serta masyarakat.

7. Penerapan Kaidah *Good Governance*

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain:

- a. Implementasi *E-Procurement*;
- b. Terlaksananya komunikasi langsung masyarakat secara tatap muka maupun elektronik;
- c. Terintegrasinya sistem informasi perencanaan dengan program penyusunan anggaran, pelaksanaan APBD, dan pengawasan pelaksanaan APBD;
- d. Peningkatan kualitas layanan perizinan;

- e. Implementasi sistem akuntansi pemerintahan;
 - f. Terselenggaranya Reformasi Birokrasi antara lain: Terlaksananya reformasi kebijakan; terbentuknya organisasi yang lebih ramping; Tersusunnya *job description* untuk setiap jabatan perangkat daerah; Meningkatkan kompetensi PNS; Tersusunnya peta kompetensi dan terseleksinya pejabat struktural; Tersusunnya sistem renumerasi bagi PNS DKI; dan Terimplementasinya pemisahan peran operator dari regulator.
 - g. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di garis depan, antara lain: pelayanan kelurahan, pelayanan kecamatan dan pelayanan di UPT-SKPD lainnya.
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
- Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain: meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat Kelurahan dan kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat komunitas mereka sendiri; meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan di tingkat Kelurahan, meningkatnya kapasitas Rukun Warga dalam melayani masyarakat.
9. Pengembangan Budaya Keragaman
- Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain
- a. Meningkatnya peran Jakarta sebagai kota budaya, antara lain: beroperasinya kawasan Kota Tua, Gedung Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai gedung pentas kelas dunia, Perpustakaan Besar DKI Jakarta dan berfungsinya perkampungan budaya betawi sebagai sentra budaya betawi.
 - b. Menumbuhkembangkan toleransi terhadap perbedaan nilai kehidupan perkotaan yang multi kultural, antara lain melalui fasilitasi budaya lokal dalam kehidupan multikultur, fasilitasi temu budaya lokal/etnis dengan budaya asing.

10. Pengelolaan Bencana

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain; meningkatnya peran Pusat Pengendalian Bencana, meningkatnya kemampuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, evakuasi dan SAR; berfungsinya pengawasan dan penegakan peraturan terhadap keamanan bangunan publik; terintegrasinya seluruh sumberdaya daerah dalam keadaan eskalasi bencana.

11. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain : dipertahankannya kualitas RTH Publik sebagai sarana sosial, sarana lingkungan, dan identitas kota, bertambahnya taman kota dan taman pemakaman umum, bertambahnya jumlah dan kualitas RTH pada RW Kumuh di lima wilayah kotamadya, dikembangkannya Taman Skala Kota, bertambahnya taman interaktif di Kelurahan yang padat penduduk dan disempurnakannya legal enforcement dan enforcement Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) terhadap kawasan yang dikembangkan oleh *developer*.

12. Pengelolaan Perumahan dan Permukiman

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain : meningkatnya ketersediaan rumah susun untuk memenuhi kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah; mengembangkan lingkungan perumahan yang sehat, terbentuknya badan usaha yang mandiri dan profesional untuk pembangunan dan pengelolaan rumah susun dan secara bertahap memindahkan penghuni bantaran kali/situ/danau dan pemukiman ilegal ke rumah susun.

13. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2009

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antar lain terselenggaranya keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009.

14. Perluasan Kesempatan Kerja dan usaha

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain; bertambahnya kesempatan kerja dan terinformasinya bursa tenaga kerja

B. Prioritas Pengalokasian APBD 2009

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, maka kebijakan prioritas pengalokasian APBD 2009 diarahkan untuk menjamin terlaksanakannya ketiga prioritas pembangunan diatas. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran SKPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya. Lebih rinci Prioritas APBD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prioritas pengalokasian pada kegiatan yang berskala besar, nyata, dan untuk kepentingan masyarakat luas (program *dedicated*).
2. Prioritas pengalokasian pada SKPD yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan langsung publik, misalnya panti sosial, puskesmas, sekolah.
3. Prioritas pengalokasian untuk menjamin keseimbangan kapasitas aparat dan kemudahan akses masyarakat (penguatan kapasitas Kecamatan dan Kelurahan, serta PPMK)
4. Prioritas pengalokasian untuk meningkatkan proporsi belanja di tingkat wilayah (Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan) melalui pendelegasian kewenangan untuk urusan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
5. Prioritas pengalokasian untuk penambahan kesejahteraan pegawai yang diperoleh dari efisiensi belanja non-fisik.